



► INDUSTRI PARIWISATA

## Hotel Hanya Mampu Bertahan 3 Bulan

**DANUREJAN**—Industri perhotelan di DIY tengah digelayuti langit gelap akibat adanya Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. Perhimpunan Hotel dan Restoran

Indonesia (PHRI) menyebut hotel di DIY hanya mampu bertahan tiga bulan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lugas Subarkah  
[lugas@harianjogja.com](mailto:lugas@harianjogja.com)

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo, menjelaskan saat ini PHRI DIY hanya bisa bertahan untuk terus beroperasi. "Kekuatan kami untuk bertahan tanpa adanya PHK karyawan hanya sekitar tiga sampai enam bulan," ujarnya saat ditemui seisuai audiensi dengan DPRD DIY, Selasa (25/3).

Hal ini berdasarkan perhitungan tingkat okupansi hotel yang terus menurun sejak Januari 2025, yakni pada Januari 60%-70%; Februari 50%; Maret 5%-15%. "Maret jeblog. Untuk reservasi April rata-rata hanya 30 persen," katanya, Selasa (25/3). Pada libur Lebaran 2025, hingga H-7 tingkat reservasi baru mencapai 5%-20% untuk periode 26 Maret sampai 21 April. Kemudian para periode 1-4 April reservasinya 20%-40%. "Okupansi menurun signifikan dibanding periode Lebaran 2024 yang bisa mencapai 60 persen sampai 70 persen," katanya.

Hal ini menunjukkan penurunan okupansi tidak saja terjadi dari sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) pemerintah, tapi juga sektor swasta atau keluarga. "MICE swasta yang biasanya kenceng, sekarang juga menurun. Daya beli masyarakat juga kami rasakan seperti itu," katanya.

Untuk menghemat biaya operasional, sejumlah hotel mulai mengurangi

PHRI menyatakan hotel di DIY hanya mampu bertahan tiga bulan sebelum melakukan PHK.

Tingkat okupansi pada Maret jeblog, hanya 5%-15%. Untuk reservasi April rata-rata hanya 30 persen.

sif karyawan sampai 50%. Kalau situasi ini didiamkan tanpa intervensi pemerintah, ribuan karyawan terancam PHK. "Sekitar 5.000 karyawan terancam PHK," katanya.

Untuk itu, PHRI DIY mendesak agar Pemerintah Pusat mencabut Inpres No. 1/2025. "Kami mengusulkan agar kebijakan itu ditinjau atau bahkan dihentikan karena sangat mengganggu perekonomian," katanya.

Untuk pemerintah daerah, ia berharap tetap melaksanakan kegiatan di hotel dengan anggaran yang disesuaikan dengan bujet yang dimiliki. "Supaya ekonomi bisa berjalan," katanya.

Ia juga berharap pemerintah daerah menerapkan relaksasi pajak bagi industri hotel, seperti yang pernah dilakukan saat Pandemi Covid-19.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Andriana Wulandari, menuturkan pariwisata menjadi leading sector ekonomi DIY. "Untuk itu, industri pariwisata harus tetap dipertahankan," kata dia.

Selain itu, Pemda DIY perlu meningkatkan kunjungan wisata domestik dan mancanegara. "Pemerintah juga harus meningkatkan pendapatan sektor wisata sebagai kontribusi terhadap perekonomian, serta memperkuat citra dan daya saing destinasi wisata di tingkat nasional dan internasional," ujarnya.

Dengan keterbatasan anggaran, Pemda DIY harus mengoptimalkan untuk didistribusikan ke industri pariwisata. "Pemda bisa mengembangkan program inovasi wisata yang lebih menarik, up to date. DIY perlu paket wisata yang bisa membuat wisatawan stay lebih lama di Jogja," katanya.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 April 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005